



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA KONEKTIVITAS,**  
**PARIWISATA, KAWASAN INDUSTRI, DAN PERUMAHAN**

Jl. Pramuka No. 33 Jakarta-Timur 10120

Telepon (021)85910353 Faksimile: (021) 85910353

Nomor : OT.04/LKIN-28/D402/2/2023

28 Maret 2023

Hal : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023  
Direktorat Pengawasan Badan Usaha  
Konektivitas, Pariwisata, Kawasan  
Industri dan Perumahan

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara  
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:

**A. Capaian Outcome sampai dengan Triwulan I Tahun 2023**

Hasil pengukuran kinerja *outcome* Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1  
Ringkasan Capaian Outcome  
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata,  
Kawasan Industri dan Perumahan  
s.d Triwulan I Tahun 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Target 2023	Realisasi s.d Tw I	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah	1.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik	Jumlah	7	0	-
		1.2	Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	Jumlah	12	0	-
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Jumlah	9	0	-
		2.2	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah	4	7	175
3	Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha	3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Jumlah	16	0	-

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Target 2023	Realisasi s.d Tw I	Capaian (%)
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD	4.1	Persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik	Jumlah	15	0	-
5	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	5.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	9	0	-
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha	6.1	Jumlah K/L dengan MRI $\geq$ Level 3	Jumlah	2	2	100
		6.2	Jumlah K/L dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Jumlah	2	3	150
		6.3	Jumlah APIP K/L dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Jumlah	2	3	150
		6.4	Jumlah BUMN dengan MRI $\geq$ Level 3	Jumlah	24	23	95.83
		6.5	Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI $\geq$ Level 3	Jumlah	5	5	100
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara	7.1	Indeks Kualitas layanan Eksternal Direktorat	Indeks Skala 100	80	0	-
		7.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1	1	100
		7.3	Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan	Jumlah	1	0	-
8	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Akuntan Negara	8.1	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	0	-
		8.2	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	25	25

Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 pada tabel 1 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

## **Sasaran Program 1**

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah

Keberhasilan sasaran program 1 diukur melalui dua indikator yaitu:

1. Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor dimensi 2 Indeks Akuntabilitas BUMN (Indonesian Corporate Accountability Index/ICORPAX), yaitu Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara. Badan Usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara/daerah kategori Baik diukur dengan menggunakan empat parameter yaitu:

- a. Capaian Target Dividend Payout Ratio
- b. Persentase Realisasi Pembayaran Pajak
- c. Persentase Realisasi Pembayaran Penerimaan Negara Lainnya
- d. Kontribusi Dividen BUMN terhadap Target Dividen Nasional (APBN)

2. Persentase BUMN dengan kinerja sehat

Indikator ini juga dinilai dengan menggunakan hasil skor dimensi 2 ICORPAX, dimana BUMN dengan kinerja "Sehat" diukur berdasarkan dua parameter, yaitu:

- a. Kesehatan Keuangan Korporasi
- b. Growth Kinerja Keuangan

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan pada Tahun 2023 adalah sebanyak 7 BUMN dengan tingkat dukungan fiskal baik, dan 12 BUMN dengan kinerja sehat.

Kinerja terkait dengan sasaran program 1, sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 belum dapat diukur, karena pengukuran ICORPAX baru akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023, sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023 masih nihil.

**Sasaran  
Program**

**2**

**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional**

Pencapaian Sasaran Program 2 diukur melalui dua indikator yaitu:

1. Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik

Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik diukur melalui skor dimensi 1 ICORPAX, melalui penilaian terhadap dua parameter, yaitu:

- a. Tingkat Kinerja Korporasi, yaitu capaian KPI yang terkait dengan proses bisnis utama.
- b. Tingkat Dukungan Korporasi pada Agenda Pembangunan. Tingkat dukungan ini dinilai melalui beberapa aspek penilaian yaitu: Kesesuaian produk lini bisnis utama terhadap program prioritas pemerintah, keberhasilan pelaksanaan atas penugasan pemerintah, cakupan penugasan pemerintah, pencapaian target penugasan, serta ada tidaknya penugasan dari pemerintah yang bermasalah.

Kinerja terkait dengan indikator ini, sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 belum dapat diukur, karena pengukuran ICORPAX baru akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023, sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023 masih nihil.

2. Jumlah PSN yang tercapai sesuai target

Jumlah PSN yang mencapai target adalah Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh BUMN yang capaian fisik proyek mencapai atau melebihi target fisik pada tahun yang bersangkutan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan proyek Strategis nasional mencapai target yang ditetapkan.

Reviu dan monitoring terhadap tata kelola PSN dilaksanakan pada setiap triwulan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 capaian kinerja indikator ini adalah 7 PSN yang mencapai target fisik, atau 175% dibandingkan targetnya sebanyak 4 PSN. PSN yang mencapai target fisik yaitu:

Tabel 2  
PSN yang mencapai target fisik s.d. Triwulan I Tahun 2023

No.	Nama PSN	% Target	% Realisasi
1	Pembangunan Fly Over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong	100	100
2	Terminal Multipurpose Labuan Bajo	100	100
3	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	100	100
4	Pengembangan Pelabuhan Kupang	100	100
5	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung	100	100
6	Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulon Progo	100	100
7	Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya	100	100

<b>Sasaran Program</b>	<b>3</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha</b>
------------------------	----------	---

Pencapaian Sasaran Program 4 ditunjukkan dengan pencapaian satu indikator kinerja yaitu Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik, dengan kriteria BUMN yang mampu mengelola proses bisnisnya dengan baik, memiliki skor kepuasan pelanggan yang baik, mampu mengelola aset dengan efektif, serta melaksanakan tanggung jawab sosialnya (CSR dan PKBL) secara efektif.

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 3 ICORPAX, yaitu Kepatuhan dan Efektivitas Operasional, dengan parameter penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan, yang dinilai melalui ada atau tidaknya permasalahan hukum yang dihadapi serta kepatuhan terhadap regulasi industri dimana BUMN tersebut melakukan bisnisnya.
2. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), yang dinilai melalui keselarasan program TJSL dengan program prioritas pencapaian SDGs, keberadaan program TJSL yang mendukung bisnis inti dan menciptakan shareholder value, serta jumlah mitra binaan yang naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha.
3. Tingkat Kepuasan, baik pelanggan, vendor maupun pegawai.
4. Tingkat Efektivitas Proses Bisnis, yang dinilai melalui pemenuhan Service Level Agreement, penerapan E-Procurement, keberadaan inovasi, penerapan teknologi informasi, serta pengelolaan SDM.

5. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset, yang dinilai melalui penerapan Asset Management Policy, Asset Management Plans, Asset Portfolio, Rasio Return on Asset, serta Rasio Fixed Asset Turnover.

Kinerja terkait dengan sasaran program 3, sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 belum dapat diukur, karena pengukuran ICORPAX baru akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023, sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023 masih nihil.

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>4</b>	<b>Meningkatnya kualitas Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD</b>
--------------------------	----------	---

Pencapaian Sasaran Program 4 ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik.

Pada tingkat sasaran strategis, keberhasilan sasaran diukur dengan menggunakan hasil skor dimensi 4 ICORPAX yaitu Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi, yang dinilai melalui empat parameter, yaitu:

1. Tingkat Efektivitas Tata Kelola (GCG), yang akan dinilai melalui pelaksanaan hak-hak stakeholder, transparansi, tanggung jawab direksi, serta skor asesmen GCG.
2. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko, yang akan dinilai melalui keberadaan framework, pelaksanaan proses manajemen risiko, serta hasil pengukuran risk maturity level.
3. Tingkat Kapabilitas Satuan Pengawas Internal, yang akan diukur melalui hasil pengukuran kapabilitas SPI dan persentase tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan SPI.
4. Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, yang diukur melalui keberadaan framework internal control, pelaksanaan proses pengendalian, ada tidaknya asersi internal control, ada tidaknya laporan keuangan audited, ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan, serta skor efektivitas sistem pengendalian intern.

Kinerja terkait dengan sasaran program 4, sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 belum dapat diukur, karena pengukuran ICORPAX baru akan

dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023, sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023 masih nihil.

<b>Sasaran Program</b> <b>5</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha</b>
---------------------------------	---

Pencapaian Sasaran Program 5 ditunjukkan dengan jumlah BUMN yang dapat memperoleh nilai baik pada hasil pengukuran akuntabilitas korporasi sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran program 6 diukur dengan menggunakan seluruh dimensi dalam ICORPAX, dimana seluruh dimensi ini mewakili akuntabilitas BUMN secara komprehensif, yang terdiri dari:

1. Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan
2. Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara
3. Dimensi Kepatuhan dan Efektivitas Operasional
4. Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi
5. Dimensi Efektivitas Pengendalian Fraud

Pengukuran indeks tersebut dilakukan dengan menggunakan sumber utama dari data terpublikasi, berupa Laporan Tahunan (Annual Report) BUMN, informasi yang berasal dari website resmi BUMN, dan laporan-laporan dari Institusi/Lembaga yang validitasnya terjamin. Pelaksanaan atas pengukuran ICORPAX juga dapat diperkuat dengan melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada masing-masing BUMN.

Kinerja terkait dengan sasaran program 5, sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 belum dapat diukur, karena pengukuran ICORPAX baru akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023, sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023 masih nihil.

<b>Sasaran Strategis</b> <b>6</b>	<b>Meningkatnya kualitas Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha</b>
-----------------------------------	---

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan melalui pendampingan dan pengawasan BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan tingkat kematangan

pelaksanaan pengendalian internal pemerintah dan tingkat kemampuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta serta Satuan Pengawas Intern (SPI) pada korporasi.

Keberhasilan sasaran strategis ini akan diukur melalui 5 indikator yaitu:

1. Persentase K/L dengan Indeks Manajemen Risiko  $\geq$  Level 3

Indeks Manajemen Risiko merupakan suatu model yang digunakan untuk mengukur kondisi karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko di suatu K/L/P. Model tersebut memadukan budaya (*culture*), tata kelola (*governance*), dan proses terkait manajemen risiko. Semakin tinggi Indeks Manajemen Risiko, diharapkan akan semakin baik kualitas pengelolaan manajemen risiko dan pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Pengukuran kualitas implementasi MR dilaksanakan dengan pendekatan *maturity level*, *capability level* maupun *maturity objectives*. Ketiga pendekatan tersebut memberikan gambaran kualitas implementasi MR yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, dengan melihat lima dimensi: struktur, budaya, proses, penggunaan aplikasi (teknologi informasi), dan hasil.

Indikator ini dinilai secara kumulatif sejak tahun pertama hingga tahun terakhir Rencana Strategis Deputy Bidang Akuntan Negara.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, jumlah Kementerian/Lembaga yang telah mencapai MRI  $\geq$  Level 3 adalah sebanyak 2 K/L yaitu Kementerian BUMN dan LPP TVRI.

2. Persentase K/L dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Setiap tingkat maturitas memiliki karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Semakin tinggi tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan birokrasi yang semakin berkualitas. Indikator maturitas penyelenggaraan SPIP mengindikasikan kinerja BPKP dari hasil



pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Indikator ini mengukur penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi area-area penyelenggaraan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan peningkatan penyelenggaraan SPIP. Maturitas SPIP diukur berdasarkan tingkat kematangan pada 5 unsur pengendalian yaitu: 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) pemantauan pengendalian intern.

Indikator ini dinilai secara kumulatif sejak tahun pertama hingga tahun terakhir Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, seluruh Kementerian/Lembaga yang diampu, yaitu sebanyak 3 K/L telah mencapai Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3.

### 3. Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan yang dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Indikator ini diukur dengan model yang mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)*. IACM menunjukkan langkah-langkah untuk naik dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif terkait dengan organisasi yang lebih matang. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimized*).

Indikator Kapabilitas APIP pada kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah mencerminkan tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif. Dari indikator ini dapat diketahui kapabilitas APIP kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta teridentifikasi area-area kapabilitas APIP yang memerlukan perbaikan untuk peningkatan kapabilitas APIP.

Indikator ini dinilai secara kumulatif sejak tahun pertama hingga tahun terakhir Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, seluruh Kementerian/Lembaga yang diampu, yaitu sebanyak 3 K/L telah mencapai Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3.

4. Persentase Badan Usaha dengan Indeks Manajemen Risiko  $\geq$  Level 3

Pada sektor Korporasi/Badan Usaha, manajemen risiko pada umumnya telah terintegrasi dalam proses bisnis sehari-hari. Badan Usaha dengan MRI Baik tercapai apabila aktivitas manajemen organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis; menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan. Indikator ini diukur berdasarkan hasil asesmen manajemen risiko pada BUMN, BUMD dan BLU/D yang berada pada maturitas MR Level 3.

Indikator ini dinilai secara kumulatif sejak tahun pertama hingga tahun terakhir Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, dari 24 BUMN/anak perusahaan yang ditargetkan untuk mencapai maturitas MR  $\geq$  Level 3, realisasinya telah mencapai 23 BUMN/anak perusahaan, baik yang telah diases oleh BPKP, konsultan maupun self assessment.

5. Persentase BUMN dengan Kapabilitas Satuan Pengawas Intern  $\geq$  Level 3

Dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Korporasi perlu mengevaluasi kualitas fungsi audit internal (Satuan Pengawasan Intern) untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders*-nya. Selain itu, untuk meningkatkan fungsi audit internal, SPI harus menilai kapabilitasnya dan melaksanakan rekomendasi perbaikan.

Penilaian Kapabilitas SPI pada BUMN dilakukan dengan menggunakan konsep IACM untuk sektor korporasi. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Indikator ini diukur dengan menggunakan Jumlah BUMN dengan kapabilitas SPI Level 3 (dari skala 1-5) dibagi jumlah total BUMN.

Indikator ini dinilai secara kumulatif sejak tahun pertama hingga tahun terakhir Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, jumlah BUMN yang memiliki SPI dengan kapabilitas Level 3 adalah sebanyak 5 BUMN/Anak Perusahaan atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu 5 BUMN.

## B. Capaian Output Pengawasan per Triwulan I Tahun 2023

Realisasi capaian output pengawasan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 adalah sebanyak 5 LHP dari target 19 LHP untuk Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3  
Ringkasan Capaian Output Pengawasan  
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata,  
Kawasan Industri dan Perumahan  
s.d Triwulan I Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Target LHP	Realisasi LHP	Capaian (%)
4222.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	4	1	25%
4222.FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah Dan Desa	2	1	50%
4222.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah Yang Dipisahkan Dan BLU/BLUD	4	1	25%
4222.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Penguatan Infrastruktur Dan Konektivitas	1	1	100%
4222.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Pembangunan Ekonomi	2	1	50%
4222.UAG.U51	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	2	0	0%
4222.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	0	0%

Realisasi laporan hasil pengawasan per indikator kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi LHP
4222.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	Laporan monitoring dukungan BUMN Pariwisata
4222.FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah Dan Desa	Laporan evaluasi perencanaan anggaran K/L

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi LHP
4222.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah Yang Dipisahkan Dan BLU/BLUD	Laporan hasil reuiu atas aksi korporasi pada PT ITDC (kajian penjualan lahan)
4222.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Penguatan Infrastruktur Dan Konektivitas	Laporan reuiu tata kelola PSN
4222.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Pembangunan Ekonomi	Laporan pemetaan risiko P3DN pada BUMN
4222.UAG.U51	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	
4222.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	

### C. Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 belum terdapat hambatan dalam pencapaian target.

### D. Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp201.600.000 atau 13,14% dari total anggaran, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 4  
Anggaran dan Realisasi Keuangan  
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata,  
Kawasan Industri dan Perumahan  
s.d Triwulan I Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
4222.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	635.600.000	79.814.000	12.56%
4222.FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah Dan Desa	54.000.000	9.000.000	16.67%
4222.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah Yang Dipisahkan Dan BLU/BLUD	218.000.000	55.977.000	25.68%
4222.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Penguatan Infrastruktur Dan Konektivitas	194.400.000	30.395.000	15.64%
4222.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Pembangunan Ekonomi	302.400.000	25.140.000	8.31%
4222.UAG.U51	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	21.600.000	0	0.00%
4222.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	104.000.000	780.000	0.75%
<b>JUMLAH</b>		<b>1.530.000.000</b>	<b>201.106.000</b>	<b>13.14%</b>

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan.

Atas perhatian dan perkenan Ibu Deputi, kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aryanto Wibowo', written in a cursive style.

Aryanto Wibowo